

FENOMENA PENGUNDURAN DIRI CASN 2021

1

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

Abstrak

Pengunduran diri CPNS dan calon PPPK pada pengadaan CASN 2021 menunjukkan masih adanya permasalahan dalam birokrasi dan manajemen ASN. Hal ini tentu saja berdampak pada pemenuhan kebutuhan SDM aparatur, menimbulkan kerugian negara, serta terhadap jalannya proses pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa sanksi akan dikenakan bagi peserta yang mengundurkan diri. Tulisan ini mengkaji fenomena pengunduran diri CASN 2021 dan evaluasi pengadaan CASN 2021. Perbaikan sistem birokrasi dan manajemen ASN harus dilakukan secara terus menerus dan signifikan dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan sistem merit. Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan secara terus menerus dapat mendukung pemerintah yaitu KemenPAN-RB dan BKN dalam memperbaiki sistem birokrasi dan manajemen ASN dengan melakukan evaluasi pengadaan CASN. Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dapat terus melanjutkan pembahasan rancangan perubahan UUU ASN dengan memperhatikan poin terkait pengadaan CASN.

Pendahuluan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat per 27 Mei 2022, setidaknya ada 100 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari 112.514 total peserta yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan pada tahun 2021. Berdasarkan data BKN, CPNS yang mengundurkan diri tersebut tersebar di berbagai instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh CPNS, namun juga Calon Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan data BKN, sebanyak 442 orang Calon PPPK mengundurkan diri dari 305.778 orang yang dinyatakan lolos di tiga jenis seleksi, terdiri dari 104 orang di kategori PPPK Guru Tahap I, PPPK Guru Tahap II sebanyak 280 orang, dan PPPK Non Guru sebanyak 58 orang (merdeka.com, 1 Juni 2022).

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyoroiti fenomena CPNS 2021 yang mengundurkan diri dan meminta pemerintah memperbaiki sistem tata kelola Aparatur Sipil Negara



(ASN). Menurutnya, fenomena ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dan perlu ada perbaikan dalam sistem remunerasi gaji terkait kesejahteraan ASN yaitu peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas (nasional. sindonews.com, 30 Mei 2022). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo juga menyesalkan banyaknya pengunduran diri Calon ASN (CASN) 2021 tersebut. Adapun pengunduran diri CASN tersebut berdampak pada formasi kosong karena tidak terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) dan merugikan negara karena pengadaan dibiayai oleh negara. Pemerintah telah menghitung jumlah CPNS yang diperlukan beserta biayanya, namun tidak mendapatkan SDM sesuai harapan (suara.com, 31 Mei 2022). Hal itu dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik karena tidak tersedianya SDM yang diinginkan. Melihat hal tersebut, tulisan ini mengkaji fenomena pengunduran diri CASN 2021 dan evaluasi pengadaan CASN 2021.

Pengunduran Diri CASN 2021

Banyaknya peserta CASN 2021 yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi tahap akhir merupakan salah satu permasalahan dalam pengadaan ASN. Beberapa alasan pengunduran diri tersebut antara lain: gaji kecil, tunjangan tak sesuai, lokasi pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, kehilangan motivasi, dan mendapatkan kesempatan lain (economy. okezone.com, 31 Mei 2022). Menyikapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, gaji kecil dan ditempatkan di mana saja menjadi konsekuensi sebagai ASN (merdeka.

com, 1 Juni 2022). Sebagaimana diketahui, menjadi seorang PNS merupakan pekerjaan dambaan dan banyak diminati masyarakat di Indonesia. Setidaknya karena adanya keamanan finansial dan jaminan pensiun walaupun dengan gaji yang kecil. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, minat masyarakat terhadap pekerjaan ASN semakin menurun. Hal ini terkait dengan perkembangan tren kehidupan dan kemajuan informasi dan teknologi (IT) terutama di era pandemi Covid-19 saat ini.

Adapun kasus pengunduran diri CASN bukan merupakan hal yang baru dan pemerintah yaitu KemenPAN-RB dan BKN telah membuat peraturan sebagai antisipasi terhadap hal ini. Namun demikian, fenomena pengunduran CASN pada 2021 ini termasuk besar jumlahnya. Padahal pengadaan CASN sebelumnya yaitu pada 2019 tertunda dan baru diselenggarakan pada 2020 karena pandemi Covid-19. Pengadaan CASN baru diselenggarakan kembali pada 2021, sehingga banyak formasi ASN yang kosong karena SDM aparatur yang pensiun dan faktor lainnya. Oleh karena itu, pengadaan CASN sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan formasi yang kosong tersebut.

Sementara itu, sanksi akan diberikan kepada peserta CASN yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos. Mereka akan dikenakan sanksi administratif yaitu pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Identitas PNS (NIP) atau Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, maka akan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya. Untuk CPNS, aturan ini telah dituangkan dalam Pasal 54 Ayat 2 Peraturan MenPAN-RB

No. 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk PPPK, diatur dalam Pasal 41 Ayat 5 PermenPAN-RB No. 28 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 dan Pasal 35 Ayat 5 PermenPAN-RB No. 29 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Adapun sanksi lainnya berupa denda, diserahkan kepada masing-masing instansi pemerintah, sebagai contoh, bagi peserta yang mengundurkan diri dari Kementerian Luar Negeri harus membayar sanksi sebesar Rp50 juta. Bagi peserta yang mengundurkan diri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional harus membayar sanksi sebesar Rp35 juta. Lalu, bagi peserta yang mengundurkan diri dari Badan Intelijen Negara (BIN), akan diberikan sanksi bertingkat yaitu dikenakan denda mulai dari Rp25 juta hingga Rp100 juta sesuai tingkat pengunduran dirinya (finance.detik.com, 26 Mei 2022).

Dalam Siaran Pers BKN No. 009/RILIS/BKN/V/2022 pada 30 Mei 2022, tentang Simak Prosedur dan Ketentuan Peserta Seleksi CASN Mengundurkan Diri, dijelaskan mengenai kategori pengunduran diri bagi peserta seleksi CPNS dan PPPK yang dinyatakan lulus, serta prosedur penyampaian dan penyelesaian peserta seleksi CASN yang dinyatakan lulus dan mengundurkan diri (mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia). Untuk kategori pengunduran diri CASN, terbagi atas beberapa skema, yaitu *pertama*, peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan kemudian mengundurkan diri serta telah diusulkan penetapan NIP kepada BKN, dapat digantikan oleh peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi; dan *kedua*, peserta seleksi yang

dinyatakan lulus dan telah ditetapkan NIP-nya tetapi belum dan/atau telah ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai CASN namun mengundurkan diri, maka formasinya tidak dapat diisi tetapi dapat diperhitungkan pada kebutuhan jabatan pada rekrutmen berikutnya.

Evaluasi Pengadaan CASN 2021

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, pengadaan ASN dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yaitu portal pelamaran terintegrasi berbasis internet. Pengadaan merupakan salah satu bagian dari manajemen ASN. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Sedangkan pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Adapun pengadaan dengan SSCASN dilakukan sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi dan sistem merit untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, kompeten, dan bebas dari KKN. Walaupun demikian, diperlukan evaluasi dalam pengadaan ASN karena perbaikan sistem birokrasi dan manajemen ASN harus secara terus menerus dilakukan demi terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Faktor-faktor yang bisa mendorong reformasi birokrasi antara lain adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaruan, memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional, memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global, serta memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Empat *leverage points* tersebut dapat dijadikan pertimbangan

dalam menyusun strategi pembaruan aparatur negara dan pemerintahan. Strategi pembaruan sistem yang harus dilakukan antara lain terkait kelembagaan yang terdiri dari kultur dan struktur. Sistem penataan kelembagaan yang bisa menjamin adanya profesionalisme yang berlandaskan pada kompetensi, akuntabilitas, dan transparansi akan bisa mendorong kinerja yang baik. Sementara itu, dalam menyusun strategi SDM aparatur perlu dipahami permasalahan saat ini antara lain kualitas SDM aparatur, kesejahteraan ASN, serta pemerataan jumlah ASN dan ketepatan penempatan ASN sesuai analisis kebutuhan pegawai yang memenuhi prinsip *rightsizing* (Thoah, 2014: 104-110).

SDM merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM itu berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu cara mencari SDM yang berkualitas yaitu melalui sistem rekrutmen atau pengadaan. Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi (Sutrisno, 2017: 3 & 45).

Terkait kualitas SDM aparatur perlu diakui seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi telah ada kemajuan yang berarti karena pengadaan ASN telah menggunakan sistem merit. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, masih ditemukan kesulitan untuk mendapatkan kualitas SDM yang mumpuni di beberapa daerah karena ketidaksesuaian pendidikan dan formasi yang dibutuhkan. Hal ini juga terkait permasalahan kurangnya

minat masyarakat dalam hal lokasi penempatan pegawai yang dianggap kurang menarik dan strategis. Selain itu, terkait kesejahteraan pegawai juga sangat berpengaruh terhadap minat dan motivasi masyarakat terutama generasi saat ini yang banyak terpengaruh perubahan tren kehidupan dan kultur secara global. Jumlah gaji yang kecil dan perbedaan tunjangan di masing-masing instansi pemerintah membuat ekspektasi masyarakat menurun dan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan ASN. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan terutama desain gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan prinsip adil dan merata sesuai beban kerja dengan memperhatikan perubahan serta tantangan global yang dinamis.

Selain itu, sistem dan citra yang dibangun dari awal masih menunjukkan ketidakprofesionalan ASN dalam melayani masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dan masih melekat dalam diri birokrasi dan ASN, walaupun saat ini telah banyak perubahan yang dilakukan melalui reformasi birokrasi. Perbaikan harus dilakukan secara terus menerus dan signifikan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi. Perubahan kebutuhan SDM aparatur juga semakin berkembang seiring pemanfaatan teknologi informasi yang meningkat sangat signifikan dalam mendukung jalannya proses pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini membuat ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya tidak hanya di kantor, namun dapat bekerja di mana saja, namun tentu saja tetap berpegang teguh dengan peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan pengadaan CASN 2021 tidak jauh berbeda dengan pengadaan CASN di tahun sebelumnya (2019). Hal ini diatur dalam Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Teknis Pengadaan PNS dan Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan BKN No. 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK. Evaluasi pengadaan CASN juga telah dilakukan oleh pemerintah pada setiap pengadaan CASN. Oleh karena banyaknya kasus pengunduran diri CASN 2021, maka evaluasi perlu ditingkatkan untuk mencegah dan meminimalisir kejadian tersebut terulang kembali. Pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB dan BKN yang bertanggung jawab dalam kebijakan dan implementasi pengadaan CASN dirasa perlu menambahkan gambaran terkait teknis pekerjaan, gaji dan lokasi penempatan, surat pernyataan kesediaan, serta sanksi pengunduran diri di awal proses seleksi yaitu tahap administrasi agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas sebelum mengikuti seleksi. Dengan demikian, diharapkan pengadaan CASN dapat menyaring masyarakat yang benar-benar mempunyai niat dan minat mengabdikan menjadi ASN sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Penutup

Pengunduran diri CPNS dan Calon PPPK pada pengadaan CASN 2021 menunjukkan masih adanya permasalahan dalam birokrasi dan manajemen ASN. Hal ini tentu saja berdampak pada pemenuhan kebutuhan SDM aparatur di instansi pemerintah di mana para CASN tersebut mundur. Proses pengadaan yang membutuhkan biaya tinggi juga menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap jalannya proses pemerintahan dan pelayanan publik. Komisi II DPR RI perlu menjalankan fungsi pengawasan secara terus menerus dan mendukung pemerintah yaitu KemenPAN-RB dan BKN dalam memperbaiki sistem birokrasi serta manajemen ASN dengan

melakukan evaluasi pengadaan CASN. Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI bersama pemerintah perlu terus melanjutkan pembahasan rancangan perubahan UU ASN dengan memperhatikan poin terkait pengadaan CASN.

Referensi

- "Fakta Fenomena Ramai-Ramai Mundur Dari CPNS", 1 Juni 2022, <https://www.merdeka.com/uang/fakta-fenomena-ramai-ramai-mundur-dari-cpns.html>, diakses 13 Juni 2022.
- "Fakta Mundurnya CPNS dari Kantor Budi Karya Hingga IKN", 27 Mei 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220527135720-4-342319/fakta-mundurnya-cpns-dari-kantor-budi-karya-hingga-ikn> diakses 13 Juni 2022.
- "Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Negara Rugi Berapa?", 26 Mei 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6096458/ratusan-cpns-mengundurkan-diri-negara-rugi-berapa>, diakses 14 Juni 2022.
- "Rugikan Negara Apa Sanksi PPPK Yang Ikut Mengundurkan Diri Seperti CPNS, 31 Mei 2022, <https://www.suara.com/news/2022/05/31/133624/rugikan-negara-apa-sanksi-pppk-yang-ikut-mengundurkan-diri-seperti-cpns>, diakses 13 Juni 2022.
- "Siaran Pers BKN Nomor: 009/RILIS/BKN/V/2022 tentang Simak Prosedur dan Ketentuan Peserta Seleksi CASN Mengundurkan Diri", 30 Mei 2022, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Prosedur-dan-Ketentuan-Peserta-Seleksi-CASN-Mengundurkan-Diri.pdf>, diakses 14 Juni 2022.
- Sutrisno, Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.

Thoha, Miftah, 2014. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.

"5 Alasan Terbesar Mengapa CPNS Mengundurkan Diri, Kaget Lihat Gaji", 31 Mei 2022, <https://economy.okezone.com/read/2022/05/31/320/2603245/5-alasan-terbesar-mengapa-cpns-mengundurkan-diri-kaget-lihat-gaji>, diakses 13 Juni 2022.

"105 CPNS Mengundurkan Diri Harus Menjadi Perhatian Serious Pemerintah", 30 Mei 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/783199/15/105-cpns-mengundurkan-diri-harus-menjadi-perhatian-serius-pemerintah-1653876330> diakses 13 Juni 2022.



Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.